

**KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN
(Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Pulau Jawa)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Nur Farida Kurnia Arifin

145020101111084



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN KOTA DI PULAU JAWA)**

Yang disusun oleh :

Nama : Nur Farida Kurnia Arifin
NIM : 145020101111084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **13 MEI 2019**.

Malang, 23 Mei 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Moh.Khusaini,S.E.,M.Si.,MA.
NIP. 197101111998021001

KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN (Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Pulau Jawa)

Nur Farida Kurnia Arifin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Email: nurfaridakurnia.arifin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kredibilitas belanja pendidikan (X_1), kesehatan (X_2), perlindungan sosial (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (X_4) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa (Y). Data yang digunakan adalah data sekunder, data alokasi dan realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia. Selain itu juga data persentase tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang dikaji termasuk dalam data panel, yakni gabungan dari data *cross-section* dan *time series*. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi panel dengan bantuan program EViews 9. Hasil analisis menunjukkan bahwa kredibilitas belanja pendidikan (X_1) memiliki t hitung -3.387937 dengan p -value 0,0008, kredibilitas belanja kesehatan (X_2) memperoleh nilai t hitung 1.995166 dengan p -value 0.0465, kredibilitas belanja perlindungan sosial (X_3) memiliki t hitung -3.646907 dengan p -value 0.0003, sedangkan pertumbuhan ekonomi (X_4) memiliki t hitung -4.057634 dengan p -value 0.0001. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kredibilitas belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Kata kunci: Kebijakan fiskal, Kredibilitas anggaran, Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan

ABSTRACT

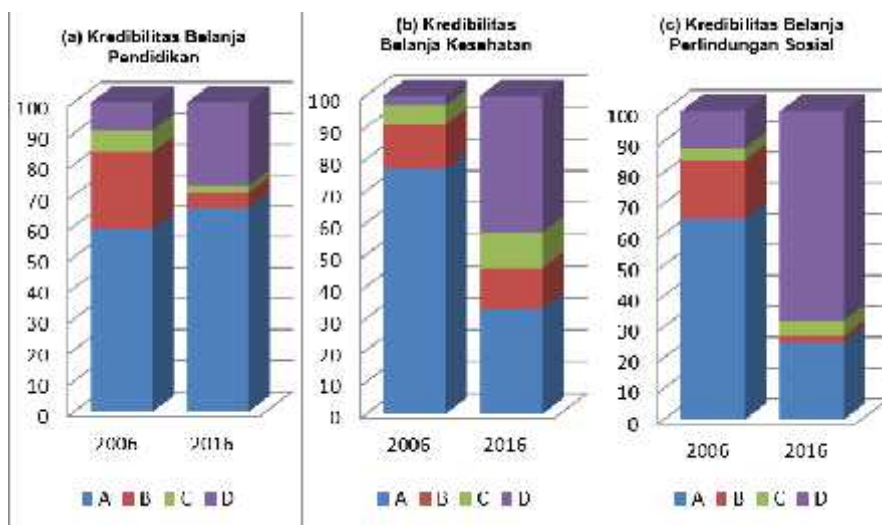
This study aimed to investigate the impact of credibility on education spending (X_1), health (X_2), social protection (X_3), and economic growth (X_4) on the poverty (Y) on Regencies and Cities in Java. The data used were secondary data, including the data of allocation and realization of the state budget for Regency/City in Java obtained from the official website of the Directorate of Fiscal Balance, Republic of Indonesia. The next data was the poverty rate of districts and cities in Java obtained from the official website of Statistics Indonesia (BPS). The type of data studied was panel data, which was a combination of cross-section and time series data. Furthermore, the method of data analysis was Regression analysis processed on EViews 9 program. The results of the analysis demonstrated that the budget credibility for education (X_1) had $t_{\text{statistics}}$ of -3.387937 with p -value of 0.0008, budget credibility for health (X_2) had $t_{\text{statistics}}$ of 1.995166 with p -value 0.0465, budget credibility for social protection (X_3) had $t_{\text{statistics}}$ -3.646907 with p -value of 0.0003, and economic growth (X_4) had $t_{\text{statistics}}$ -4.057634 with p -value 0.0001. Therefore, it can be concluded that the credibility of education, health, social protection, and economic growth spending have significant effect on the poverty on Java region.

Keywords: Fiscal policy, Budget credibility, Economic growth, Poverty

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia dimulai sejak bergulirnya era reformasi, di mana negara memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan publik secara otonom dengan harapan pelayanan publik juga dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan desentralisasi, tidak lain, adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public services*) dan memajukan perekonomian daerah. Menurut UU No.2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi di Indonesia dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi politik, dan desentralisasi fiskal (Haris, 2014). Dari ketiga jenis tersebut, desentralisasi fiskal menjadi sangat vital terutama dalam memacu perekonomian daerah karena mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (PBB, 2012). Desentralisasi fiskal menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi daerah yang bersangkutan. Salah satu bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik terefleksikan dari kredibilitas kebijakan fiskal yang selalu diusahakan tercapai oleh suatu daerah.

Kredibilitas kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan (*gap*) antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Pada kenyataannya, kredibilitas kebijakan fiskal di Indonesia sendiri masih sulit untuk dicapai. Ketidakefektifan perencanaan penganggaran di tahun sebelumnya yang menjadi titik tumpu, diikuti dengan tidak adanya dewan khusus perencanaan anggaran karena anggaran yang dirumuskan dan dijalankan masih menjadi tanggung jawab pemerintah dari berbagai instansi bukan merupakan dewan khusus penganggaran, hal ini juga menyumbang persentasi tidak tercapainya kredibilitas fiskal di Indonesia maupun di pemerintahan daerah. Di Indonesia, Pulau Jawa sebagai pulau utama penopang aktivitas ekonomi Indonesia justru mengalami penurunan kredibilitas kebijakan fiskal selama periode 2006 sampai dengan 2016. Berikut disajikan data kredibilitas belanja kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2006 & 2016:



Gambar 1. Kredibilitas Belanja Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2006 & 2016
Sumber: Data Diolah dari DJPK Berdasarkan Kriteria PEFA (2016)

Kredibilitas kebijakan fiskal ini dapat dilihat dari: (i) kredibilitas belanja pendidikan; (ii) kredibilitas belanja kesehatan, dan (iii) kredibilitas belanja perlindungan sosial, yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan (Tyasari, 2015; Jamil, 2017). *Pertama*, kredibilitas belanja pendidikan misalnya, 59% Kabupaten/Kota di Pulau Jawa masuk dalam kategori A (sangat kredibel) pada tahun 2006, kemudian meningkat menjadi 66% pada tahun 2016. Namun di saat yang bersamaan, terjadi peningkatan persentase Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang masuk dalam kategori D (sangat tidak kredibel), dari 11% pada tahun 2006 menjadi 28% pada tahun 2016. Dalam artian, peningkatan persentase Kabupaten/Kota dengan status belanja pendidikan yang sangat tidak kredibel lebih tinggi dari peningkatan persentase Kab/Kota dengan belanja pendidikan

yang sangat kredibel. *Kedua*, kredibilitas belanja kesehatan mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2006, sekitar 77% Kabupaten/Kota di Pulau Jawa masuk dalam kategori sangat kredibel. Namun pada tahun 2016, hanya tersisa sebesar 33% Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dalam kategori kredibel. Daerah di Pulau Jawa dengan belanja kesehatan sangat tidak kredibel yang semula sekitar 3% kemudian melonjak menjadi 44%. *Ketiga*, kredibilitas belanja perlindungan sosial juga mengalami penurunan yang hampir sama dengan belanja kesehatan. Daerah dengan belanja perlindungan sosial yang sangat kredibel mencapai 65% pada tahun 2016 menjadi 25% pada tahun 2016, diringi pula dengan peningkatan persentase daerah dengan kredibilitas belanja perlindungan sosial yang sangat rendah.

Perlu ditekankan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan yang kredibel menjadi krusial karena terkait kemampuan riil pemerintah dalam merealisasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga mampu ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (Tyasari, 2015; Jamil, 2017). Sementara itu, kredibilitas belanja perlindungan sosial menjadi penting karena mengindikasikan kemampuan riil pemerintah dalam merealisasikan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (BAPPENAS, 2014). Ketiga fakta yang telah dijelaskan sebelumnya mengisyaratkan bahwa kredibilitas kebijakan fiskal yang semakin memburuk menjadi hambatan tersendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini diperkuat adanya fakta bahwa Pulau Jawa masih merupakan wilayah kantong kemiskinan, sebagai konsekuensi dari jumlah absolut penduduk yang lebih banyak dari wilayah lain. Jumlah absolut penduduk miskin Kabupaten/Kota di Pulau Jawa berkisar antara 50 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa. Karakteristik kemiskinan yang didasarkan pada jumlah absolut penduduk miskin Pulau Jawa sangat jauh berbeda dengan pulau lain, seperti Pulau Kalimantan notabene juga merupakan penopang ekonomi nasional yang didominasi Kabupaten/Kota dengan penduduk miskin berkisar 10 ribu sampai dengan 50 ribu jiwa.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Kabupaten/Kota di Pulau Jawa menghadapi masalah memburuknya kredibilitas fiskal, selain juga Pulau Jawa saat ini belum beranjak dari statusnya sebagai kantong kemiskinan. Sehingga, penting untuk dilakukan penelitian terkait dampak kredibilitas fiskal terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Menurut Roy dan Weeks (2016), investasi publik di Indonesia masih belum berpihak pada kelompok miskin (*pro-poor*). Bahkan ada indikasi bahwa kebijakan ini jika tetap dipertahankan akan “memukul” kondisi penghidupan kelompok miskin di Indonesia menjadi lebih buruk. Selain merujuk pada fenomena tersebut penelitian ini menjadi penting karena beberapa penelitian menganggap bahwa kredibilitas fiskal hanya menyangkut fungsi stabilitas (lihat Kuncoro, 2015), sementara kredibilitas fiskal sebagai fungsi alokasi dan redistribusi tidak banyak mendapat perhatian di dalam studi terdahulu dengan landasan fungsi alokasi dan redistribusi penelitian ini merujuk pada belanja publik yang membatasi penelitian pada beberapa pos belanja yang difokuskan pada belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah menurunnya kredibilitas fiskal di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kredibilitas belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kredibilitas Kebijakan Fiskal

Para Pelaku Ekonomi pada dasarnya akan memberikan respon yang positif terhadap kebijakan yang kredibel dan konsisten, kredibel yang dimaksud disini ialah berupa kebijakan yang mampu memberikan kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Baxter dan Hauner et al dalam Nella (2015) kredibilitas didefinisikan sebagai ide yang tinggal dalam pelaku pasar tentang seberapa dekat hasil kebijakan akan kebijakan yang diumumkan

a. Teori Prinsipal-Agen

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan

semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Seringkali kesulitan timbul karena distribusi informasi yang asimetris yang menguntungkan agen termasuk dalam hal terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard*. Kofman dan Lawarrée (1993) menjelaskan bahwa teori keagenan juga berlaku pada ranah perumusan kebijakan publik. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal berwujud hubungan prinsipal-agen, dimana pemilih memberikan kekuasaan yang dimilikinya kepada politisi terpilih.

b. Teori Signalling

Secara substansial, teori ini tidak dapat dilepaskan dari teori prinsipal agen, di mana presiden membutuhkan kerja sama berbagai pemangku kepentingan untuk membiayai anggaran yang diajukannya. Para pemangku kepentingan di sisi lain, akan mencoba untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya dalam proses penganggaran, baik dengan memanfaatkan instrumen perpajakan dan belanja negara sebagai imbalan atas persetujuan terhadap anggaran yang telah diajukan. Dengan berbagai konflik kepentingan yang dihadapi, ada informasi asimetris yang memungkinkan Presiden untuk menjadi agen yang tidak mematuhi prinsipal. Presiden memiliki insentif untuk membuat janji politik kepada publik yang berkaitan dengan penganggaran yang kemudian tidak dilaksanakan karena bertentangan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Menurut *World Bank* (1998), masalah *signalling* cenderung banyak terjadi terutama di negara-negara yang bergantung pada bantuan. Organisasi internasional dapat memiliki pengaruh besar terhadap rencana anggaran, seperti dalam kasus Liberia, Tanzania dan Uganda, namun memiliki preferensi yang berbeda dengan Presiden yang berkuasa.

c. Perspektif Praktis

Kredibilitas kebijakan fiskal dalam perspektif praktis dapat dilihat dari pengalihan dana yang dianggarkan dari tujuan semula. Pengalihan dana ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor sistemik dan lingkungan yang dihadapi. Pengalihan dana ini mulai dari pencurian langsung, hingga penyimpangan dana di dalam dan di antara lembaga-lembaga sektor publik, pengalihan yang tidak sah, dan intervensi antar-tahun dalam pelaksanaan anggaran oleh lembaga-lembaga pusat. *Gap* antara pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual dapat dimaknai secara positif maupun negatif. Secara positif, *gap* tersebut dapat dibenarkan apabila mencerminkan reaksi lembaga-lembaga pemerintahan dalam merespons peristiwa tidak terduga selama tahun fiskal, tanpa harus mengorbankan implementasi program fiskal yang telah ditetapkan sebelumnya (Peters, 2002). Selain itu, *gap* pengeluaran dimaknai secara negatif apabila disebabkan oleh kendala sistemik dalam menajemen pengeluaran. Peningkatan efektivitas merupakan tujuan jangka panjang yang membutuhkan pengembangan manajemen efektif dan efisien bersama dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan staf terkait. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan komponen penting dari serangkaian reformasi belanja publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja publik.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan menurut Haughton dan Khandker (2009) adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Dipandang dari sisi moneter, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, seseorang tergolong miskin bila berada di bawah batasan tersebut. Selain menurut ukuran moneter, kemiskinan juga mencakup aspek nutrisi, yakni diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Sen (1987) menyatakan bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan muncul akibat seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan yang buruk, ketidakamanan, rasa percaya diri yang rendah atau ketidakberdayaan. Menurut Harniati (2007), kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional dan kompleks, serta terbagi dalam tiga jenis, yaitu kemiskinan alamiah, Kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Selanjutnya, Dubois dan Miley (1992), Todaro (2006), Manurung dan Santoso (2015) menambahkan bahwa empat faktor penyebab kemiskinan yaitu faktor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keberfungsian sosial.

C. METODE PENELITIAN

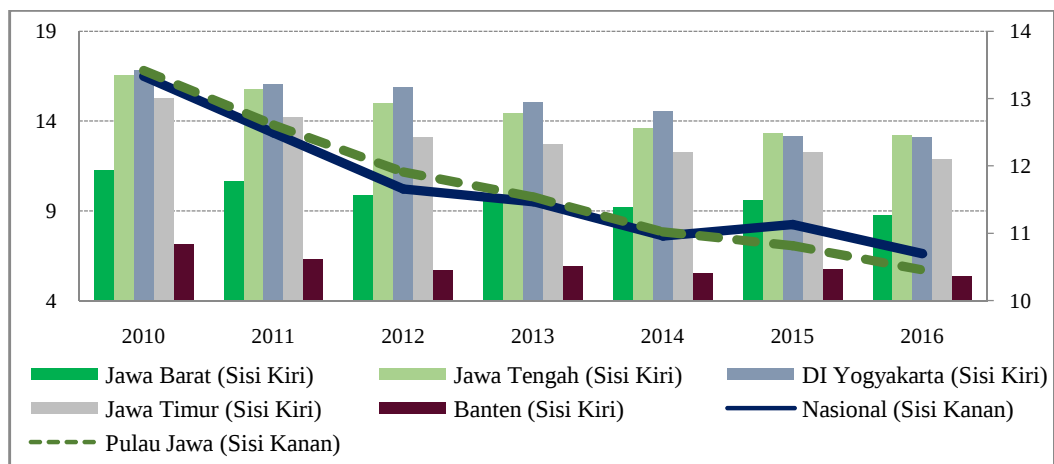
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel dependen yaitu kemiskinan (Y), sedangkan variabel independen yaitu kredibilitas belanja pendidikan (X_1), kesehatan (X_2), perlindungan sosial (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (X_4). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu pagu dan realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia. Selain itu, data sekunder lain yaitu persentase tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang dikaji termasuk dalam data panel, yakni gabungan dari data *cross-section* dan *time series*. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi panel dengan bantuan program EViews 9. Tahapan analisis Regresi panel meliputi estimasi model (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*), pemilihan model estimasi, dan uji kelayakan model sekaligus uji hipotesis melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik (Multikolinearitas, Heterokedastisitas, Autokorelasi, dan Normalitas) sebagai syarat analisis Regresi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Kredibilitas Belanja Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- H_2 : Kredibilitas Belanja Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- H_3 : Kredibilitas belanja perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- H_4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kemiskinan di Pulau Jawa

Berikut disajikan profil kemiskinan di pulau jawa pada tahun 2010 hingga 2016 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun 2018:



Gambar 2. Persentase Jumlah Orang Miskin di Pulau Jawa dan Nasional
Sumber: Diolah dari BPS RI (2018)

Berdasarkan data di atas, persentase penduduk miskin di Pulau Jawa relatif lebih tinggi daripada nasional pada tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 misalnya, persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 13,42 persen, dimana angka ini sedikit lebih tinggi daripada capaian nasional yakni sebesar 13,33 persen. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada tahun 2014, dimana persentase penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 11,02 persen, sementara persentase penduduk miskin nasional mencapai 10,96 persen. Kondisi mulai sedikit berubah pada tahun 2015-2016, dimana persentase penduduk miskin di Pulau Jawa lebih rendah daripada nasional. Pada tingkat provinsi, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah secara bergantian menyandang status sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin tertinggi masih berada di DI Yogyakarta yaitu sebesar 16,56 persen, sedangkan

pada tahun 2016, kemiskinan tertinggi dimiliki oleh Jawa Tengah yakni sebesar 13,19 persen. Selanjutnya, ditinjau dari dikotomi perkotaan dan perdesaaan menurut BPS (2018), tingkat kemiskinan di Pulau Jawa khususnya di perkotaan sedikit lebih tinggi daripada daerah-daerah lain pada level nasional yang kebanyakan bermukim di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Tingkat kemiskinan Pulau Jawa terutama perdesaan hampir sama dengan daerah-daerah lain pada level nasional, dimana Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tetap menyumbang angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Hasil Analisis Regresi Panel

Analisis Regresi diawali dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan data penelitian dapat dilanjutkan dengan analisis Regresi. Secara ringkas, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian telah lolos uji asumsi Multikolinearitas, Heterokedastisitas, Autokorelasi, dan Normalitas. Adapun hasil uji asumsi klasik tidak ditampilkan dalam artikel ini (hasil lengkap tersaji dalam laporan penelitian). Setelah uji asumsi klasik dinyatakan lolos, maka dilakukan penentuan model Regresi. Ringkasan hasil analisis Regresi sekaligus pengujian model (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*), dan diperoleh bahwa model terpilih dalam analisis adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, dijelaskan ringkasan hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Regresi panel

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	13.68536	66.14944	0.0000
FC ^{EDU}	-0.004706	-3.387937	0.0008
FC ^{HLT}	0.001169	1.995166	0.0465
FC ^{SOC}	-0.001937	-3.646907	0.0003
GRO	-0.05291	-4.057634	0.0001
<i>R-squared</i>	0.944095		
<i>Adjusted R-squared</i>	0.934422		
<i>S.E Regression</i>	1.283957		
<i>Sum squared resid</i>	952.8588		
<i>Log Likelihood</i>	-1078.497		
<i>F-statistic</i>	97.6089		
<i>Prob (F-statistik)</i>	0.000000		
<i>Durbin-Watson stat</i>	0.643198		

Sumber: Data diolah (2019)

Selanjutnya, interpretasi hasil analisis Regresi panel secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiendeterminasi (*R-squared*) merepresentasikan besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisiendeterminasi memiliki besaran antara 0 dan 1, apabila nilai koefisiendeterminasi mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas memberikan informasi yang semakin dapat memprediksi variabel terikat (Wooldridge, 2000: 249). Nilai R^2 yang diperoleh yaitu 0,94, sehingga dapat dinyatakan bahwa kredibilitas belanja pendidikan (X_1), kesehatan (X_2), perlindungan sosial (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (X_4) memiliki pengaruh sebesar 94% terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Adapun sisanya yaitu 6% mewakili pengaruh dari variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

b. Uji Simultan (Uji F)

Dalam analisis Regresi, uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, yakni untuk mengetahui signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p value*) dengan taraf nyata (α) 0,05. Pengaruh antar variabel dinyatakan signifikan apabila *p value* kurang dari ($<$) α 0,05. Berdasarkan sajian data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai F hitung pada *Fixed Effect Model* (FEM) yang diperoleh adalah 97.6089 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa kredibilitas belanja pendidikan (X_1), kesehatan (X_2), perlindungan sosial (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (X_4)

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.

c. *Uji parsial (Uji t)*

Dalam penelitian ini, uji parsial dinyatakan sebagai uji hipotesis, yakni untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Senada dengan uji simultan, pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p value*) dengan taraf nyata (α) 0,05. Pengaruh antar variabel dinyatakan signifikan apabila *p value* kurang dari ($<$) α 0,05. Dengan kata lain, hipotesis penelitian diterima apabila $p < \alpha$ 0,05. Secara ringkas, hasil pengujian hipotesis berdasarkan *Fixed Effect Model* (FEM) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel	t-Hitung	p-Value	Interpretasi	Kesimpulan
1	Kredibilitas belanja pendidikan (X_1)	-3.387937	0.0008	Negatif dan signifikan	H_1 Diterima
2	Kredibilitas belanja kesehatan (X_2)	1.995166	0.0465	Positif dan signifikan	H_2 Diterima
3	Kredibilitas belanja perlindungan sosial (X_3)	-3.646907	0.0003	Negatif dan signifikan	H_3 Diterima
4	Pertumbuhan Ekonomi (X_4)	-4.057634	0.0001	Negatif dan signifikan	H_4 Diterima

Sumber: Data diolah (2019)

Pembahasan

a. Pengaruh Kredibilitas Belanja Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Kredibilitas belanja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti bahwa percepatan realisasi belanja pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terbukti dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Secara teoritis, peranan kredibilitas belanja pendidikan, yang berarti percepatan realisasi belanja pendidikan, dalam memerangi kemiskinan telah diungkapkan oleh beberapa peneliti, sebut saja Njong (2010) dan Birowo (2011). Landasan teoritis yang mendasari, yaitu percepatan realisasi belanja berarti meningkatkan kapasitas pemerintah dalam percepatan investasi di bidang pendidikan yang berujung pada peningkatan skill dan produktivitas rumah tangga miskin. Secara empirik, temuan ini tidak mengejutkan karena belanja pendidikan sendiri merupakan instrumen fiskal yang bersifat *mandatory*, sehingga setiap daerah mengalokasikan minimal 20% dari total belanjanya untuk pendidikan. Dengan kebijakan tersebut, pengeluaran pendidikan kelompok miskin dari kantong pribadinya tidak membebani belanja pada aspek lainnya.

Percepatan realisasi belanja pendidikan sebagai *proxy* kredibilitas belanja pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk pencapaian program wajib belajar sembilan tahun sehingga kelompok miskin memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Perbaikan akses pendidikan ini dapat tercermin dari harapan lama sekolah (HLS) di Pulau Jawa yang terilustrasikan pada Gambar 4.8. HLS sendiri didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Belanja pendidikan memiliki efek terhadap penurunan kemiskinan bukan hanya di Pulau Jawa, namun hal yang sama juga ditemukan dalam skala nasional. Efek paling besar dari belanja pendidikan terhadap penurunan kemiskinan terjadi di China (Fan & Hazell, 2001) dan Ghana (Dabla-Norris dan Matovum 2002). Selain itu, ada beberapa negara yang merasakan manfaat yang sama dari belanja pendidikan, yakni Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia dan India (Jung dan Thorbecke, 2003; Fan *et al*, 1999; Fan *et al*, 2004a; Fan *et al*, 2004b; Fan & Rao, 2003; Fan & Hazel, 2001).

b. Pengaruh Kredibilitas Belanja Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil estimasi dari pengaruh kredibilitas belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap kemiskinan dalam penelitian ini adalah signifikan dan berpengaruh positif. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan kredibilitas belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kemiskinan adalah belum tercapainya efisiensi belanja kesehatan yang mana hal ini dapat mengurangi manfaat yang akan diterima sehingga

cenderung akan menambah beban bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ke *et al* (2011) dan Jamil (2017) yang memaparkan ada tiga alasan yang mendasari ketidakefisienan tersebut, yakni: (i) gagal pemerintah mengidentifikasi barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat; (ii) gagal pemerintah mengenali adanya efek eksternalitas atau *benefit-spillover*; dan (iii) gagal pemerintah mengidentifikasi barang publik yang membutuhkan skala ekonomi tertentu. Li *et al* (2012) mencontohkan bahwa peningkatan belanja kesehatan cenderung hanya berfokus pada upaya kesehatan kuratif tanpa dibarengi upaya promotif-preventif yang masif sehingga menyebabkan beban anggaran yang dibutuhkan lebih besar.

Sejalan dengan itu, Agustina *et al* (2018) mengkonfirmasi bahwa selama periode studi dalam penelitian ini (2010-2016), ada dua karakteristik pelayanan kesehatan yang menjadi fokus. *Pertama*, periode 2010-2013 merupakan periode dengan karakteristik pelayanan kesehatan dengan sistem yang terfragmentasi. Adapun populasi yang di *cover* dalam asuransi kesehatan adalah kelompok miskin dan masyarakat rentan yang sumber pembiayaannya disubsidi oleh pemerintah daerah. *Kedua*, periode 2014-2016 merupakan periode dengan karakteristik pelayanan kesehatan *Universal Health Coverage* (UHC). Pelayanan kesehatan dengan karakteristik ini meng-*cover* hampir seluruh penduduk. Hanya saja, UHC dengan penekanan upaya kesehatan kuratif ini menimbulkan alokasi belanja kesehatan yang melampaui titik optimalnya (Aaron & Ginsburg, 2009). Dalam kasus Pulau Jawa ini, penelitian yang dilakukan oleh Herrera dan Pang (2004) menjadi relevan. Di banyak negara berkembang dengan kepadatan penduduk akibat urbanisasi, belanja yang tidak efisien justru menimbulkan masalah baru sehingga memperlemah kapasitas pemerintah dalam melakukan intervensi di bidang kesehatan. Belanja kesehatan yang digunakan secara tidak efisien, lanjut Herrera dan Pang (2004), cenderung memiliki korelasi yang tinggi dengan peningkatan prevalensi penderita HIV/AIDS.

c. Pengaruh Kredibilitas Belanja Perlindungan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kredibilitas belanja perlindungan sosial signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini tidak mengejutkan, karakteristik belanja perlindungan sosial dicirikan melalui pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Hasil ini sebetulnya memiliki rujukan teoritis. Dampak negatif dari belanja sosial yang berorientasi pada redistribusi pendapatan seperti, *crowding-out*, dapat dikompensasikan dengan manfaat sosial lebih tinggi yang diperoleh suatu negara. Argumen tersebut didasarkan pada peranan investasi publik yang memberikan pengaruh melalui proses pengali (*multiplier*) terhadap permintaan agregat (*demand side*) sejalan dengan perspektif Keynesian. Jika dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan, belanja perlindungan sosial dapat menjadi jaring pengaman sosial yang mencegah penurunan daya beli pada rumah tangga miskin (Kenworthy 1995; Perotti, 1996). Jika daya beli masyarakat terjaga, tidak terkecuali rumah tangga miskin, maka akan mampu menstimulus penawaran agregat (*supply side*) yang mana mencegah dapat mencegah terjadinya *crowding-out* (karena investasi swasta meningkat dari adanya peningkatan penawaran agregat sebagai respons untuk memenuhi permintaan agregat).

Secara empirik, peningkatan realisasi belanja perlindungan sosial terhadap penurunan kemiskinan di Pulau Jawa dapat dibuktikan pada kasus pensasaran raskin yang diteliti oleh Satriawan *et al* (2015). Raskin menjadi indikator belanja sosial yang penting karena karakteristik masyarakat miskin yang masih mengalokasikan pengeluaran rumah tangga terbesarnya pada aspek pengeluaran makanan. Selain Raskin/Rastra, percepatan realisasi belanja perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) penting untuk dilihat dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan di Pulau Jawa. Paling tidak, ada tiga tujuan PKH yang relevan dengan pengentasan kemiskinan yaitu; (i) meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses kesejahteraan sosial; (ii) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (iii) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan sosial. Perlu ditekankan, program PKH ini dibiayai 5 persennya didanai oleh APBD pada setiap Kabupaten/Kota.

d. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini tidak mengejutkan mengingat struktur ekonomi di Pulau Jawa cenderung masih bersifat padat karya (*capital intensive*) untuk menjawab persoalan populasi yang jauh lebih

besar daripada pulau lainnya. Berdasarkan data struktur PDRB pulau Jawa tahun 2016, sektor pertanian dan sektor industri yang notabene merupakan sektor padat karya mampu menyumbangkan sekitar 41% terhadap aktivitas ekonomi di Pulau Jawa. Sementara daerah-daerah lainnya di Indonesia memiliki kontribusi sektor pertanian dan sektor industri terhadap aktivitas ekonomi jauh lebih kecil yaitu sebesar 33%. Dalam hal ini, peningkatan kontribusi sektor padat karya dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja sehingga mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan.

Selain argumentasi tersebut, efek pertumbuhan ekonomi (*growth effect*) yang dapat mengurangi kemiskinan dapat dijelaskan melalui empat argumen pokok (Le *et al*, 2014; Nallari dan Griffith, 2011; Roemer dan Gugerty, 1997), antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi lebih cenderung mengarah langsung pada pengurangan kemiskinan ketika aset ekonomi suatu negara didistribusikan relatif sama
2. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan kelompok miskin secara proporsional karena didukung oleh kebijakan ekonomi yang inklusif seperti stabilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan pasar, dimana setiap kelompok diberikan kesempatan yang sama dalam aktivitas ekonomi.
3. Di dalam pertumbuhan ekonomi, kelompok miskin tidak hanya mendapat keuntungan dari pertumbuhan pendapatan nominalnya, tetapi juga dari teknologi yang membuat barang yang mereka konsumsi lebih murah di pasar, sehingga meningkatkan daya beli mereka.
4. Sebagian besar pengurangan kemiskinan secara mutlak di negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, di mana sebagian besar masyarakat miskin tinggal dan mencari nafkah dari pertanian. Kebijakan pertanian dan ketenagakerjaan mempengaruhi partisipasi kaum miskin pedesaan dalam ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredibilitas belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik belanja pendidikan yang merupakan *mandatory spending* sehingga pemerintah daerah berkewajiban memastikan anggaran pendidikan memenuhi syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Kredibilitas belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan temuan ini, ada indikasi bahwa peningkatan belanja kesehatan tidak diikuti dengan efisiensi. Ada tiga alasan yang mendasari ketidakefisienan tersebut, yakni: gagal nya pemerintah dalam (i) mengidentifikasi barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat; (ii) mengenali adanya efek eksternalitas atau *benefit-spillover*; dan (iii) mengidentifikasi barang publik yang membutuhkan skala ekonomi tertentu.
3. Kredibilitas belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dibuktikan adanya fakta bahwa belanja perlindungan sosial di Pulau Jawa sudah telah tepat sasaran sehingga kelompok termiskin 30% di bawah mampu menikmati manfaat dari adanya belanja perlindungan sosial.
4. Pembangunan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. Dengan kata lain, semakin tinggi pembangunan ekonomi, maka tingkat kemiskinan semakin menurun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang mencakup rekomendasi kebijakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kredibilitas belanja pendidikan perlu ditingkatkan terutama untuk meningkatkan akses kelompok miskin terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang menunjang aktivitas ekonominya.
2. Kredibilitas belanja kesehatan perlu ditingkatkan namun harus dibarengi dengan perbaikan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan sehingga manfaat yang diperoleh kelompok miskin menjadi lebih besar. Kredibilitas belanja kesehatan perlu dimasifkan pada upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif sehingga kelompok miskin dapat

- memanfaatkan pengeluarannya untuk belanja kebutuhan lain yang lebih urgen daripada untuk upaya kesehatan kuratif.
3. Kredibilitas belanja perlindungan sosial perlu ditingkatkan dengan dibarengi penargetan terhadap kelompok miskin yang sesuai sasaran. Belanja perlindungan sosial harus dipastikan efektif sebagai jaring pengaman untuk mencegah individu menjadi miskin.
 4. Peningkatan aktivitas ekonomi yang bersifat padat karya harus pula dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tetap mampu menurunkan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Haris, Syamsuddin (2014). *Masalah-masalah Demokrasi dan kedaulatan di Masa Demokrasi*, Jakarta : Erlangga
- Tyasari, Rachma (2015) *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2012*". Thesis ; Yogyakarta, Program Master Universitas Gajah Mada
- Jamil, H. (2017). Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5 (2).
- Bappenas. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Roy, R., & Weeks, J. (2016). Making fiscal policy work for the poor. *UNDP Asia-Pacific Regional Programme on Macroeconomics of Poverty Reduction (New York: UNDP)*.
- Kuncoro, H. (2015). Credible fiscal policy and exchange rates stabilization. *Journal of Economics and Development Studies*, 3(2), 7-18.
- Kuncoro, H, Nella D, K Dianta (2015). Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Pada Inflasi di Indonesia *Journal of Economics and Development Studies*, ISBN 978-602-17102.3.4
- Kofman, F., & Lawarrée, J. (1993). Collusion in hierarchical agency. *Econometrica*, 61(3), 629–56.
- Peters, L. (2002). *Sound Budget Execution for Poverty Reduction*. Conference: World Bank Institute training programaja Grafindo Persada.
- Haughton, J dan Khandker, S. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. The International Bank for Reconstruction and Development/The WorldBank
- Sen, Amartya K. (1987). *The Standard of Living: The Tanner Lectures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harniati. 2007. *Tipologi Kemiskinan dan Kerentanan Berbasis Agroekosistem dan Implikasinya Pada Kebijakan Pengurangan Kemiskinan*. Disertasi tidakditerbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dubois, B. dan Miley, K.K. 1992. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga
- Manurung, F. A., & Santoso, D. B. (2015). Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).

- Birowo, T. (2011). *Relationship Between Government Expenditure And Poverty Rate In Indonesia*. Doctoral dissertation. Ritsumeikan Asia Pacific University.
- Fan, S. & Hazel, P. (2001). Returns to Public Investments in the Less-favored Areas of India and China. *American Journal of Agricultural Economics*, 83(5).
- Dabla-Morris E., & Matovu, J. M. (2002). Composition of Government Expenditures and Demand for Education in Developing Countries. *IMF Working Paper 02/78*, Washington DC.
- Jung, H.S. & Thorbecke, E. (2003). The Impact of Public Education Expenditure on Human Capital, Growth, and Poverty in Tanzania and Zambia: A General Equilibrium Approach. *Journal of Policy Modeling*, 25(8).
- Fan, S., & Rao, N. (2003). Public Spending in Developing Countries: Trend, Determination and Impact. *EPTD Discussion Paper No. 99*, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
- Fan, S., Hazel, P. & Thorat, S. (1999) Linkages between Government Spending, Growth, and Poverty in Rural India. *Research Report 110*, International Food Policy Research Institute, Washington DC.
- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Achadi, E. L., Taher, A., ...& Thabrany, H. (2018). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. *The Lancet*.
- Aaron, H. J., & Ginsburg, P. B. (2009). Is health spending excessive? If so, what can we do about it?. *Health Affairs*, 28(5), 1260-1275.
- Herrera, S. & Pang, G. (2004). *Efficiency of Public Spending in Developing Countries: An Efficiency Frontier Approach*. Mimeo. World Bank.
- Perotti, R. (1996). Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say. *Journal of Economic Growth* 1:149-87.
- Satriawan, E, Perdana, A., & Prima, R.A. (2015) Pembelajaran Dari Uji Coba Desain Baru Raskin 2012: Temuan dari Studi Pemantauan TNP2K. *Kertas Kerja TNP2K 28-2015*. Jakarta, Indonesia: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Nallari, R., & Griffith, B. (2011). Understanding Growth and Poverty: Theory, Policy, and World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2281>, July 24, 2017.
- Roemer, M., & Gugerty, M.K. (1997). *Does economic growth reduce poverty?*. CAER II Discussion Paper 4, Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Le, Minh Son. *et al.* 2014. Economic Growth and Poverty in Vietnam: Evidence from Elasticity Approach. *Griffith Business School Discussion Paper Economics No.2014-01*